

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar Belakang Masalah Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu kemajuan bangsa hanya bangsa yang cerdas dan berkarakter kuat yang mampu mengatasi persoalan zamannya, menyiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas yang perlu disesuaikan dengan kemajuan zamannya. Fokus pembangunan pada sumber daya yang dianggap sebagai hal yang nyata untuk menciptakan kesejahteraan dan perbaikan hidup terutama di negara-negara berkembang. Tiga sektor utama dalam pembangunan manusia sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah adalah pembangunan bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Bidang pendidikan pemerintah memandang perlu memperbaharui sistem perekrutan calon guru yang profesional dalam jumlah yang disesuaikan dengan program perencanaan kebutuhan guru secara nasional, kebijakan ini harus bersinergi dengan program seluruh unit yang terkait dengan perencanaan kebutuhan, persiapan, pengadaan, dan penjaminan mutu guru, termasuk koordinasi dengan pemangku kepentingan pendidikan di daerah-daerah. Guru memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dan keutuhan negara.

Negara Indonesia dengan wilayah yang luas dengan heterogen, secara geografis maupun sosial kultural memerlukan upaya yang kuat untuk mengatasi berbagai permasalahan diantaranya, permasalahan pendidikan di daerah 3T (terdepan, tertinggal dan terluar). Terdepan dalam arti daerah-daerah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, sehingga bisa dikatakan negara yang merupakan garis depan dari negara Indonesia contohnya : Aceh, Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dikarenakan daerah-daerah yang menjadi sasaran berada pada luar pulau Jawa, atau bisa disebutkan daerah paling luar dari negara ini, tertinggal, dapat diartikan sebagai pendidikan yang meliputi sarana dan prasarana dalam pengajaran dan juga ketertinggalan teknologi serta kekurangan dalam hal tenaga pendidik. Daerah sasaran adalah daerah yang meliputi kabupaten yang termasuk kategori daerah terdepan, tertinggal dan tertinggal berdasarkan kriteria dari kementerian pembangunan daerah tertinggal delapan provinsi yaitu provinsi Aceh,

kepulauan riau, nusa tenggara timur, kalimantan timur , kalimantan barat, sulawesi utara, papua, dan papua barat.

Permasalahan pendidikan di daerah-daerah sasaran tersebut antara lain terkait dengan sumberdaya pendidikan, seperti kekurangan jumlah guru, yang tidak sebanding dengan jumlah siswa, pemerataan jumlah guru. Yang tidak seimbang melalui kelulusan guru yang masih dibawah standar, dan ketidak sesuaian ilmu pendidik dengan bidang yang diajarkan dan juga guru yang bekerja di Dinas. Program profesi guru (PPG) ada 2 yaitu PPG Prajabatan: Program ini ditujukan bagi lulusan S1 atau D4 yang belum memiliki pekerjaan sebagai guru. Mereka akan mengikuti pendidikan profesi selama beberapa waktu sebelum diangkat menjadi guru, serta PPG Dalam Jabatan: Program ini diperuntukkan bagi guru yang sudah berstatus sebagai guru dan ingin meningkatkan kompetensi serta mendapatkan sertifikat pendidik. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai PPG prajabatan.

Untuk mengujudkan target sertifikasi guru melalui program PPG pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan, dana dan evaluasi secara periodik. upaya dalam melalui kebijakan diujudkan dalam bentuk regulasi diantaranya undang-undang, peraturan pemerintah, intruksi presiden peraturan daerah kebijakan-kebijakan tersebut dalam implementasinya dijadikan sebagai pedoman dan landasan hukum untuk mencapai target sertifikasi program profesi guru karna untuk mengikuti PPG ini harus melalui sistem tes on line seperti dahulu hanya dengan portofolio, adapun yang dijadikan dasar hukum program PPG yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru: Peraturan ini merupakan regulasi terbaru yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan PPG, mulai dari persyaratan peserta, kurikulum, hingga proses sertifikasi. Permendikbudristek ini menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur tentang sertifikasi guru melalui PPG.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Undang-undang ini mengamanatkan adanya standar nasional pendidikan dan sertifikasi sebagai salah satu mekanisme untuk menjamin mutu pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: Undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang wajib

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: Peraturan ini menjabarkan lebih lanjut mengenai standar kualifikasi dan kompetensi guru, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan program sertifikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru: Peraturan ini secara khusus mengatur tentang guru, termasuk di dalamnya mekanisme sertifikasi guru.

Selain peraturan-peraturan di atas terdapat pula peraturan-peraturan lain yang lebih teknis, seperti Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) yang mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan PPG. Secara garis besar, dasar hukum program sertifikasi melalui PPG bertujuan untuk mewujudkan guru yang profesional dan berkualitas, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. PPG merupakan program pendidikan lanjutan yang dirancang untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi guru secara sistematis, terstruktur, dan berbasis praktik reflektif. Dalam pelaksanaannya, PPG menuntut guru untuk menguasai teori dan praktik pembelajaran, mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, serta memiliki kemampuan refleksi dan inovasi pedagogi yang berkelanjutan. Lulusan PPG diharapkan mampu menunjukkan kualitas kinerja yang signifikan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik dan iklim akademik di Sekolah.

Program PPG sebagai salah satu jalur sertifikasi guru dilaksanakan untuk menjamin bahwa guru yang mengajar memiliki standar kompetensi yang sesuai. guru-guru SMP yang telah mengikuti program ini diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam proses pembelajaran, manajemen kelas, dan pengembangan peserta didik. Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Indonesia adalah Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Berikut adalah beberapa poin penting mengenai penyelenggara PPG: Penetapan LPTK: Perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai

penyelenggara PPG disebut Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Penetapan ini didasarkan pada hasil seleksi dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, Persyaratan LPTK: Untuk dapat menyelenggarakan PPG, LPTK harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk: Akreditasi institusi minimal Baik Sekali (B), diutamakan Unggul (A) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Memiliki program studi kependidikan S1 yang terakreditasi minimal B (ada ketentuan khusus untuk beberapa program studi), Memiliki kerjasama dengan sekolah-sekolah terakreditasi minimal B sebagai tempat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Memiliki unit atau lembaga yang secara khusus mengelola program studi PPG, Memiliki sumber daya manusia (dosen) memenuhi persyaratan. Daftar LPTK: Setiap tahunnya, Kemendikbudristek menerbitkan daftar LPTK yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program PPG. Daftar ini dapat berubah sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan, daftar LPTK terbaru pada laman resmi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) atau Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kemendikbudristek. Jenis PPG: Baik PPG Prajabatan maupun PPG Dalam Jabatan diselenggarakan oleh LPTK yang telah ditunjuk.

Seiring dengan pelaksanaan PPG, seorang guru untuk mengikuti PPG harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku persyaratan untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dibedakan antara PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan. Berikut rinciannya: Persyaratan Umum (Kemungkinan berlaku untuk keduanya, namun detail spesifik bisa berbeda):

1. Persyaratan Khusus PPG Prajabatan:

- a. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari program studi yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) atau terdata pada basis unit data unit Penyetaraan Ijazah Luar Negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri.
- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- c. Berusia paling tinggi 32 (tiga puluh dua) tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran.
- d. Belum terdaftar sebagai Guru/Kepala Sekolah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

2. Persyaratan Khusus PPG Dalam Jabatan:

- a. Berstatus sebagai guru dalam jabatan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan tugas mengajar. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan tanggal yang ditentukan (biasanya beberapa tahun sebelumnya).
- b. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- c. Terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- d. Memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV yang linier dengan bidang studi PPG yang akan diikuti.
- e. Aktif mengajar selama beberapa tahun terakhir.
- f. Usia maksimal yang ditentukan (biasanya lebih tinggi dari PPG Prajabatan).

Pelaksanaan program PPG tidak hanya dilakukan dipusat atau daerah yang maju, tetapi juga mencakup daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), salah satunya adalah Kota Sabang, Provinsi Aceh. Kota Sabang, yang merupakan salah satu kota kepulauan diujung barat Indonesia, memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda dari wilayah daratan utama. Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil dan keterbatasan dalam hal infrastruktur pendidikan, Kota Sabang menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Dalam penjelasan diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai evaluasi guru sertifikasi smp program PPG dengan maksud ingin mendapatkan informasi secara akurat mengenai sertifikasi program PPG di kota sabang, Dalam konteks ini, implementasi program PPG di Kota Sabang menjadi sangat penting untuk ditelaah. Meskipun para guru telah memperoleh sertifikat pendidik melalui program PPG, belum banyak kajian ilmiah yang mengevaluasi sejauh mana efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP. Apakah kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru benar-benar meningkat setelah mengikuti PPG? Apakah terdapat kendala dalam penerapan kompetensi tersebut di ruang kelas, terutama di daerah dengan kondisi geografis dan sumber daya yang terbatas?

Evaluasi terhadap pelaksanaan program PPG di Kota Sabang menjadi penting sebagai upaya untuk melihat kesenjangan antara kompetensi yang diharapkan dan kondisi nyata di Lapangan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program,

termasuk metode pelatihan, dukungan kebijakan, serta relevansi materi dengan kebutuhan lokal. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan program di masa mendatang, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh di daerah-daerah terpencil.

Dalam perspektif akademik dan kebijakan pendidikan, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan model evaluasi program pendidikan profesi guru yang kontekstual. Evaluasi ini tidak hanya mengukur hasil (output), tetapi juga proses pelaksanaan, kebermanfaatan, dan keberlanjutan program sertifikasi guru di daerah kepulauan seperti Kota Sabang. Dengan demikian, disertasi ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan praktis dalam merancang kebijakan peningkatan mutu guru yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap guru-guru bersertifikasi PPG sangat penting dilakukan untuk menilai implementasi program, keberhasilan pencapaian kompetensi guru, serta dampaknya terhadap proses pembelajaran di sekolah. Dengan melakukan evaluasi ini, diharapkan akan ditemukan gambaran objektif tentang kualitas hasil program PPG dan rekomendasi yang relevan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Sabang.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan agenda strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, terlebih dalam menghadapi eraglobalisasi dan revolusi industri 4.0 yang menuntut sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan kompetitif (Calderón et al., 2020). Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, guru memegang peran sentral sebagai agen utama transformasi pendidikan (Galante, 2020). Oleh karena itu, upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja guru menjadi prasyarat mutlak dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermutu (Gegenfurtner et al., 2020). Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun peradaban bangsa yang maju, adil, dan sejahtera (Hellas et al., 2023). Dalam era globalisasi yang sarat dengan persaingan antarnegara, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu daya saing nasional (Lachner et al., 2021). Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan nasional menjadi agenda strategis yang terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia (Lie et al., 2020). Salah satu unsur terpenting dalam sistem pendidikan adalah guru (Markula & Aksela, 2022). Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik,

pembimbing, dan fasilitator dalam proses pembelajaran serta pembangunan karakter peserta didik (Nousheen et al., 2020). Oleh karena itu peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru merupakan langkah penting yang tidak dapat diabaikan (Nunes et al., 2022). Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing (Popova et al., 2022). Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program strategis, salah satunya adalah Program Pendidikan profesi guru (PPG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kinerja guru melalui pelatihan dan sertifikasi yang sistematis dan terukur.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa setiap guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) dan sertifikat pendidik. Sertifikasi guru dimaksudkan untuk menjamin bahwa guru yang bertugas memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang sesuai dengan standar nasional pendidikan (Shutaleva et al., 2023). Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) kemudian ditetapkan sebagai mekanisme utama untuk mewujudkan guru-guru bersertifikat dan profesional yang memenuhi standar tersebut. Program PPG dirancang sebagai pendidikan lanjutan yang mengembangkan dan menguatkan kompetensi guru secara sistematis, terstruktur, dan berbasis praktik reflektif. Lulusan PPG diharapkan mampu menguasai teori dan praktik pembelajaran, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, serta memiliki kemampuan refleksi dan inovasi pedagogik yang berkelanjutan. Dalam kondisi ideal guru SMP yang telah mengikuti PPG seharusnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja pembelajaran, manajemen kelas, dan pengembangan peserta didik.

Namun realitas implementasi program PPG di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup serius antara harapan kebijakan dan kondisi aktual. Data nasional menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, masih terdapat jutaan guru yang belum tersertifikasi, dan dari mereka yang telah lulus PPG, kualitas peningkatan kompetensi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), tantangan implementasi PPG semakin

kompleks akibat keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, dan sumber daya pendidikan.

Kota Sabang sebagai kota kepulauan di ujung barat Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan internasional, merupakan salah satu daerah terdepan yang menghadapi tantangan khas dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil dan keterbatasan infrastruktur pendidikan, Kota Sabang menghadapi permasalahan dalam hal kekurangan jumlah guru yang tidak sebanding dengan jumlah siswa, pemerataan guru yang tidak seimbang, kualifikasi kelulusan guru yang masih di bawah standar, serta ketidaksesuaian antara latar belakang keilmuan pendidik dengan bidang yang diajarkan. Kondisi geografis kepulauan juga berdampak pada keterbatasan akses terhadap program pelatihan, bimbingan akademik, dan fasilitas Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang berkualitas. Meskipun program PPG telah dilaksanakan di Kota Sabang dan sejumlah guru SMP telah memperoleh sertifikat pendidik, belum tersedia kajian ilmiah yang secara khusus dan komprehensif mengevaluasi efektivitas program tersebut dalam konteks lokal wilayah kepulauan. Pertanyaan mendasar yang belum terjawab adalah: apakah kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru benar-benar meningkat secara signifikan setelah mengikuti PPG, dan apakah terdapat kendala struktural dalam penerapan kompetensi tersebut di ruang kelas, terutama di daerah dengan kondisi geografis dan sumber daya yang terbatas

Kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dan kondisi nyata di lapangan setidaknya mencakup beberapa dimensi. Pertama, dari aspek konteks, terdapat ketidaksesuaian antara desain program PPG yang bersifat nasional dengan kebutuhan spesifik dan kondisi geografis Kota Sabang sebagai wilayah kepulauan. Kedua, dari aspek masukan, kesiapan kurikulum, kualifikasi fasilitator, dan ketersediaan sarana prasarana belum tentu memadai untuk mendukung keterlaksanaan program secara optimal di daerah dengan akses terbatas. Ketiga, dari aspek proses, pelaksanaan pembelajaran PPG, PPL, dan bimbingan akademik berpotensi mengalami hambatan teknis, administratif, maupun geografis yang belum teridentifikasi dan terdokumentasi secara sistematis. Keempat, dari aspek produk, dampak nyata program PPG terhadap peningkatan kualitas pembelajaran

di kelas dan perubahan kinerja guru SMP di Kota Sabang belum dapat dikonfirmasi secara empiris. Kondisi kesenjangan tersebut menegaskan urgensi dilakukannya evaluasi yang sistematis dan komprehensif terhadap pelaksanaan program PPG di Kota Sabang. Evaluasi bukan sekadar penilaian akhir, melainkan merupakan proses untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program agar dapat dijadikan dasar perbaikan yang berkelanjutan. Dalam perspektif akademik dan kebijakan pendidikan, penelitian evaluatif ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan model evaluasi program pendidikan profesi guru yang kontekstual dan berbasis bukti.

Pendidikan profesi guru (PPG) merupakan program pendidikan lanjutan yang dirancang untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi guru secara sistematis, terstruktur, dan berbasis praktik reflektif. Dalam pelaksanaannya, pendidikan profesi guru (PPG) menuntut guru untuk menguasai teori dan praktik pembelajaran, mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, serta memiliki kemampuan refleksi dan inovasi pedagogis yang berkelanjutan. Lulusan pendidikan profesi guru (PPG) diharapkan mampu menunjukkan kualitas kinerja yang signifikan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik dan iklim akademik di sekolah.

Seiring dengan dicanangkannya reformasi pendidikan, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menetapkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Untuk mewujudkan guru yang profesional, maka guru diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi. Program sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam menjamin mutu guru melalui penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki. Dalam perjalanannya, sertifikasi guru mengalami berbagai penyempurnaan, salah satunya melalui implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sertifikasi menjadi syarat utama bagi guru profesional. Program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai salah satu jalur sertifikasi guru dilaksanakan untuk menjamin bahwa guru yang mengajar memiliki standar kompetensi yang sesuai. Guru-guru SMP yang telah mengikuti program ini diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam proses pembelajaran, manajemen kelas, dan pengembangan peserta didik.

Program pendidikan profesi guru (PPG) merupakan pendidikan lanjutan bagi guru setelah menyelesaikan pendidikan sarjana kependidikan atau nonkependidikan. Pendidikan profesi guru (PPG) dilaksanakan sebagai bentuk penguatan profesionalisme guru melalui sistem pendidikan berbasis kompetensi, dengan pendekatan pembelajaran yang lebih aplikatif dan berbasis praktik di lapangan. Program ini bertujuan untuk membentuk guru yang mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam proses pembelajaran yang bermutu. Sertifikat pendidik yang diperoleh dari program pendidikan profesi guru (PPG) menjadi bukti pengakuan terhadap kompetensi profesional guru yang bersangkutan. Pelaksanaan program pendidikan profesi guru (PPG) tidak hanya dilakukan di pusat atau daerah yang maju, tetapi juga mencakup daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), salah satunya adalah Kota Sabang, Provinsi Aceh. Kota Sabang, yang merupakan salah satu kota kepulauan di ujung barat Indonesia, memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda dari wilayah daratan utama. Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil dan keterbatasan dalam hal infrastruktur pendidikan, Kota Sabang menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Dalam konteks ini implementasi program pendidikan profesi guru (PPG) di Kota Sabang menjadi sangat penting untuk ditelaah. Meskipun para guru telah memperoleh sertifikat pendidik melalui program pendidikan profesi guru (PPG), belum banyak kajian ilmiah yang mengevaluasi sejauh mana efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP. Apakah kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru benar-benar meningkat setelah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG)? Apakah terdapat kendala dalam penerapan kompetensi tersebut di ruang kelas, terutama di daerah dengan kondisi geografis dan sumber daya yang terbatas?

Evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan profesi guru (PPG) di Kota Sabang menjadi penting sebagai upaya untuk melihat kesenjangan antara kompetensi yang diharapkan dan kondisi nyata di lapangan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program, termasuk metode pelatihan, dukungan kebijakan, serta relevansi materi dengan kebutuhan lokal. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar

bagi perbaikan program di masa mendatang, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas Pendidikan secara menyeluruh di daerah-daerah terpencil. Selain itu dalam perspektif akademik dan kebijakan pendidikan, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan model evaluasi program pendidikan profesi guru yang kontekstual. Evaluasi ini tidak hanya mengukur hasil (output), tetapi juga proses pelaksanaan, kebermanfaatan, dan keberlanjutan program sertifikasi guru di daerah kepulauan seperti Kota Sabang. Dengan demikian, disertasi ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan praktis dalam merancang kebijakan peningkatan mutu guru yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Kota Sabang, sebagai wilayah paling barat Indonesia, memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan dan pemerataan mutu pendidikan. Meskipun merupakan kota kecil, upaya peningkatan kualitas guru melalui program pendidikan profesi guru (PPG) telah dijalankan. Namun, hingga kini belum banyak kajian evaluatif yang secara khusus menelaah sejauh mana efektivitas program tersebut dalam konteks lokal Kota Sabang, terutama pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Evaluasi terhadap guru-guru bersertifikasi pendidikan profesi guru (PPG) sangat penting dilakukan untuk menilai implementasi program, keberhasilan pencapaian kompetensi guru, serta dampaknya terhadap proses pembelajaran di sekolah. Dengan melakukan evaluasi ini, diharapkan akan ditemukan gambaran objektif tentang kualitas hasil program pendidikan profesi guru (PPG) dan rekomendasi yang relevan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Sabang.

Dari sisi pendanaan program PPG Dalam Jabatan di Kota Sabang mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Alokasi anggaran tersebut mencakup biaya penyelenggaraan program oleh LPTK, biaya uji kompetensi, serta tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifikasi. Berdasarkan data Kemendikbudristek, anggaran tunjangan profesi guru secara nasional mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, yang menunjukkan komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru. Namun demikian besaran anggaran yang tersedia belum sepenuhnya dapat mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur yang dihadapi,

sehingga diperlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung capaian program.

Berdasarkan uraian di atas evaluasi yang sistematis, komprehensif, dan berbasis bukti terhadap pelaksanaan program PPG di Kota Sabang merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Evaluasi bukan sekadar penilaian akhir, melainkan merupakan proses untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program secara menyeluruh mencakup relevansi kebijakan, kesiapan sumber daya, kualitas pelaksanaan, hingga dampak nyata terhadap kompetensi guru agar dapat dijadikan dasar perbaikan yang berkelanjutan. Tanpa evaluasi yang mendalam dan kontekstual, kesenjangan antara desain kebijakan nasional dan kondisi riil di lapangan, khususnya di daerah kepulauan seperti Kota Sabang, akan terus berlangsung dan menghambat upaya pemerataan kualitas pendidikan di wilayah 3T. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menghasilkan gambaran objektif yang dapat menjadi referensi ilmiah dan praktis bagi para pengambil kebijakan dalam merancang program peningkatan mutu guru yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru SMP di Kota Sabang. Berbagai permasalahan tersebut dapat dipetakan ke dalam empat dimensi evaluasi sebagai berikut:

1. Terdapat indikasi bahwa program PPG yang dirancang secara nasional belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi spesifik daerah kepulauan seperti Kota Sabang. Kebutuhan nyata guru SMP di wilayah ini, karakteristik geografis dan demografis, serta kebijakan pendidikan daerah yang ada belum dianalisis secara mendalam kaitannya dengan relevansi program PPG. Selain itu, landasan hukum dan regulasi yang menjadi pijakan program PPG perlu dikaji kesesuaiannya dengan kondisi lokal Kota Sabang.
2. Ditemukan potensi masalah pada kesiapan kurikulum PPG yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan kompetensi guru di daerah 3T, kualifikasi dan kompetensi fasilitator atau dosen PPG yang menangani peserta dari wilayah

kepulauan, kesiapan dan karakteristik peserta program dari Kota Sabang, serta ketersediaan sarana prasarana dan dukungan teknologi yang diperlukan dalam proses pembelajaran PPG secara daring maupun luring.

3. Sejumlah permasalahan yang dapat diidentifikasi meliputi: kesesuaian pelaksanaan pembelajaran PPG dengan rencana dan standar yang ditetapkan, efektivitas kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah-sekolah mitra di Kota Sabang, kualitas bimbingan akademik yang diterima peserta selama program berlangsung, efektivitas sistem monitoring dan evaluasi yang diterapkan, serta kendala teknis, administratif, dan geografis yang dihadapi selama proses pelaksanaan program.
4. Permasalahan yang teridentifikasi mencakup: sejauh mana kompetensi pedagogik guru SMP benar-benar meningkat setelah mengikuti PPG, bagaimana perubahan pada kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian guru pasca-PPG, dampak nyata program terhadap kualitas pembelajaran di kelas dan hasil belajar peserta didik, serta keberlanjutan penerapan kompetensi yang diperoleh dalam praktik pembelajaran sehari-hari di lingkungan Kota Sabang.

Dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi di atas, penelitian ini difokuskan pada evaluasi komprehensif program PPG dengan menggunakan model CIPP yang mencakup keempat dimensi tersebut, khusus untuk guru SMP bersertifikasi di Kota Sabang pada periode 2022–2025.

C. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang dapat dievaluasi dari program PPG, penelitian ini secara tegas dibatasi pada evaluasi pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru SMP bersertifikasi di Kota Sabang, Provinsi Aceh, dengan menggunakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, terarah, dan menghasilkan temuan yang bermakna secara akademis maupun praktis. Secara spesifik, pembatasan masalah evaluasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Evaluasi dibatasi pada analisis landasan hukum program PPG, identifikasi kebutuhan program, tujuan program, serta kesesuaian rancangan program dengan kondisi nyata wilayah Kota Sabang sebagai daerah kepulauan di ujung barat Indonesia.
2. Evaluasi dibatasi pada penilaian kesiapan kurikulum PPG, kualifikasi dan kompetensi fasilitator, kesiapan peserta program dari Kota Sabang, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung keterlaksanaan program secara optimal.
3. Evaluasi dibatasi pada kajian pelaksanaan pembelajaran PPG, kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), kualitas bimbingan akademik, serta sistem monitoring dan evaluasi yang diterapkan selama program berlangsung, khususnya dalam konteks pelaksanaan di wilayah kepulauan.
4. Evaluasi dibatasi pada penilaian peningkatan empat kompetensi utama guru (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian) serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran di kelas.

Subjek penelitian dibatasi pada guru SMP bersertifikasi PPG yang bertugas di sekolah-sekolah SMP di Kota Sabang, Provinsi Aceh, pada periode waktu 2022–2025. Evaluasi tidak mencakup jenjang pendidikan lain (SD, SMA/SMK), dan tidak menjangkau wilayah di luar Kota Sabang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah evaluasi yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program PPG meliputi landasan hukum, kebutuhan, tujuan, dan kesesuaian program dengan kondisi wilayah Kota Sabang telah terpenuhi dengan baik?
2. Bagaimana program PPG meliputi kesiapan kurikulum, kualifikasi fasilitator, kesiapan peserta, serta ketersediaan sarana prasarana mendukung keterlaksanaan program secara optimal?
3. Bagaimana pelaksanaan program PPG meliputi pembelajaran, PPL, bimbingan akademik, dan monitoring evaluasi berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan?

4. Bagaimana program PPG meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru, serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran telah dicapai?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan program Pendidikan Profesi Guru (PPG), khususnya dalam konteks peningkatan kualitas guru di wilayah kepulauan seperti Kota Sabang, Provinsi Aceh.

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang evaluasi pendidikan, khususnya terkait evaluasi program PPG. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep evaluasi program yang lebih kontekstual, terutama pada daerah dengan karakteristik geografis khusus seperti wilayah kepulauan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi program pendidikan dan pengembangan profesionalisme guru.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah dan Pengambil Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas guru, khususnya dalam pelaksanaan dan pengembangan program PPG di daerah kepulauan dan wilayah 3T.

b. Bagi Lembaga Penyelenggara PPG (LPTK)

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program PPG, baik dari aspek kurikulum, proses pembelajaran, maupun sistem evaluasi program agar lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan.

c. Bagi Sekolah dan Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami kualitas dan kinerja guru yang telah mengikuti program PPG, serta sebagai dasar dalam melakukan pembinaan dan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan.

d. Bagi Guru

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi guru yang telah mengikuti program PPG dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan rujukan dalam melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan evaluasi program pendidikan, khususnya dalam konteks peningkatan mutu guru dan kualitas pembelajaran.

F. *State of The Art*

Kajian terhadap PPG telah menghasilkan beragam temuan dari berbagai peneliti. Beberapa di antaranya adalah sebagaimana tertera pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 *State of the Art*

NO	Tahun	Judul Penelitian	Topik	Hasil	Nama Jurnal
1	Muthiah ,2021	Evaluasi Program PPG Indonesia Report November 2021	Evaluasi PPG	Pelaksanaan PPG Sudah Baik dengan Rekomendasi Perbaikan	The Indonesian Institute (TII)
2	Syayidah ,2023	Evaluasi Supervisi Cipp Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Jawa Timur	Evaluasi CIPP	Program Evaluasi Mampu Meningkatkan Kinerja Guru	Prophetik Kajian Keislaman
3	Sumarsi, Dkk.2022	Analisis Implementasi PPG	Kompetensi Guru	Kompetensi Guru Berpengaruh Terhadap Kinerja Guru	Jurnal Basicedu
4	Mahlil Dan Bangun ,2022	Analisis Program PPG Sebagai Agen Transformasi Dalam Sistem Pendidikan Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh	Pelaksanaan PPG	Pelaksanaan Pgp Berjalan Dengan Baik Dan Berpengaruh Secara Signifikan	Prointegrita Univ. Darma Agung

NO	Tahun	Judul Penelitian	Topik	Hasil	Nama Jurnal
5	Satriawan, Dkk, 2021	PPG dan Transformasi Sekolah Dalam Kerangka Inkuiri Apresiatif	Pelaksanaan PPG	Pelaksanaan PPG Berjalan Dengan Baik Dan Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Transformasi Pendidikan Di Sekolah	Alidarah Jurnal Kependidikan Islam
6	Sa'adah, 2022	Implementasi Program PPG di Pppptk Tk Dan Plb	Pelaksanaan PPG	Menjabarkan Tahapan Pelaksanaan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan	Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan
7	Sodik, Dkk.2022	Strategi Meningkatkan Kinerja Guru Melalui Program PPG	Pelaksanaan PPG	Menjabarkan Pelaksanaan Dan Strategi Yang Digunakan Dalam PPG	Studia Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
8	Nurhalisa, Dkk, 2022	Program PPG Dalam Meningkatkan profesionalisme Guru Di Sma Negeri 2 Polewali	PPG	PPG Berhasil Meningkatkan Kompetensi Guru	Jurnal Administrasi, Kebijakan Dan Kepemimpinan Pendidikan
9	Fitriyah & Wardani, 2023	Kemampuan Guru PPG Dalam Program Merdeka Belajar Di Daerah Jember	Program Guru PPG	Guru PPG Memiliki Potensi Profesional	Sjes: Scholarly Journal Of Elementary School

NO	Tahun	Judul Penelitian	Topik	Hasil	Nama Jurnal
10	Fitriyah, Dkk.2023	Paradigma PPG Bagi Guru Sekolah Dasar	PPG	Kemampuan Guru Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka	Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan
11	Rohman, Dkk.2023	Evaluasi Program PPG Di Kabupaten Lombok Utara NTB	PPG	Dampak PPG Yang Baik Berdasarkan Persentase Disetiap Aspek	Jurnal Paedagogy: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan
12	Sumarsih, Dkk.2022	Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Guru PPG Sekolah Dasar	PPG	PPG Berdampak Pada Perubahan Siswa	Jurnal Basicedu
13	Jannati, Dkk.2023	Peran PPG Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar	Peran PPG	6 Peran Guru PPG dalam Kurikulum Merdeka	Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah
14	Pribadi, Dkk.2023	Kinerja PPG Dalam Kurikulum Merdeka	Kinerja Guru PPG	Hasil Keikutsertaan PPG Dari Perspektif Guru	JISIP (Jurnal Ilmu

Dari semuanya kajian yang ada, cakupan informan atau lokasi penelitian masih berfokus pada satu tingkatan sekolah, pada guru disekolah tertentu atau pada perseorangan. Oleh karena itu, peneliti berusaha menganalisis hasil kinerja para guru yang telah mengikuti Program pendidikan program profesi (PPG) yang kemudian dianalisis dan melihat dampaknya terhadap warga sekolah dari berbagai perspektif. Hasil ini kemudian bisa menjadi salah satu aspek yang menunjukkan keberhasilan dari pelaksanaan Program pendidikan program profesi (PPG) sendiri

Berdasarkan sintesis penelitian yang relevan sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan (novelty)

yang signifikan karena menggabungkan tiga aspek yang belum pernah dilakukan secara bersamaan dalam penelitian sebelumnya, yaitu: (1) lokasi penelitian di wilayah kepulauan dan daerah 3T (Kota Sabang), (2) penggunaan model evaluasi CIPP secara komprehensif dengan keempat komponennya, dan (3) fokus pada guru SMP bersertifikasi PPG dalam periode 2022–2025. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu evaluasi program pendidikan, khususnya dalam konteks implementasi program PPG di daerah-daerah dengan karakteristik khusus.



Intelligentia - Dignitas